



SALINAN

**BUPATI MAMUJU UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
UTARA NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kurang efektif dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**DAN**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor..... ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana :
  - b. Sekretaris Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Program;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pencegahan;
    - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik , terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Kedaruratan;
    - 2) Sub Bidang Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Rehabilitasi;
    - 2) Sub Bidang Rekonstruksi;
  - f. Bidang Pemadam kebakaran, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Penanganan Kebakaran;
    - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Unsur Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 18 Desember 2012  
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu



Pada tanggal 18 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA

TTD

Drs. M. NATSIR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2012 NOMOR  
19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

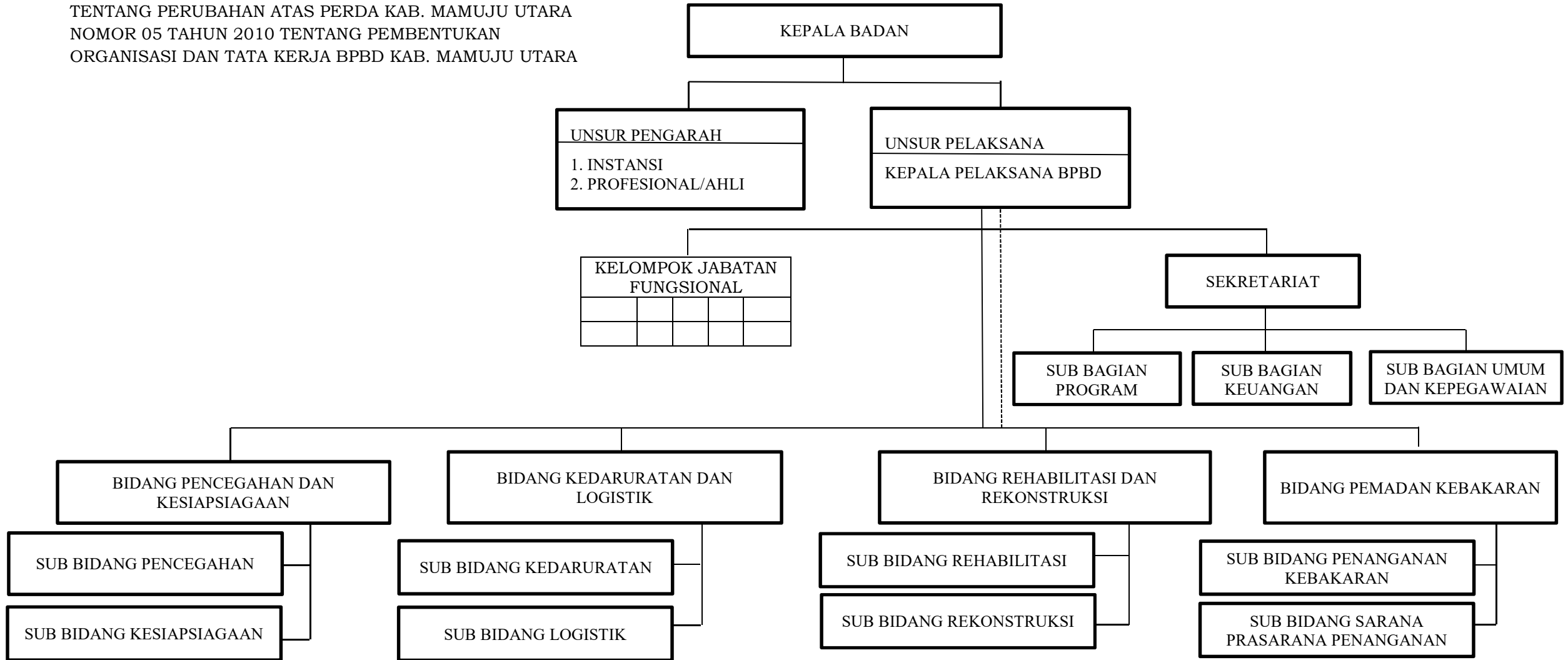
Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



LAMPIRAN I  
 PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2012  
 TANGGAL 19 DESEMBER 2012  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. MAMUJU UTARA  
 NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BPBD KAB. MAMUJU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. MAMUJU UTARA



BUPATI MAMUJU UTARA  
 TTD  
 H. AGUS AMBO DJIWA